Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 6, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Analisis Kerentanan Sosial Akibat Krisis Air Bersih di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara

Ananias D. I. Billi[1], Akhmad Syarifudin[2], Yeftha Y. Sabaat[3]
[123] Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

ARTICLE INFO

Article history:
Received September, 2025
Revised September, 2025
Accepted September, 2025
Available online September, 2025

ananiasbili88@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Penelitian ini mengkaji krisis sosial, ekonomi, dan politik di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten TTU, NTT, menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan krisis air bersih menjadi pemicu utama penurunan kualitas hidup, rendahnya produktivitas pertanian, beban ekonomi rumah tangga, dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah desa. Lemahnya tata kelola dan minimnya kerja sama masyarakat memperpanjang krisis. Penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian krisis membutuhkan solusi terpadu melalui perbaikan infrastruktur air, penguatan tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Krisis air bersih, kerentanan sosial, ekonomi desa, tata kelola, partisipasi masyarakat

A B S T R A C T

This study examines the social, economic, and political crises in Fafinesu B Village, TTU Regency, East Nusa Tenggara, using a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation. Findings indicate that the clean water crisis is the primary trigger of declining quality of life, reduced agricultural productivity, economic burdens, and weakened public trust in local governance. Weak management and limited community collaboration have prolonged the problem. The study concludes that an integrated solution is required, including water infrastructure improvements, governance strengthening, and community empowerment.

***Keywords**: Clean water crisis, social vulnerability, rural economy, governance, community participation*

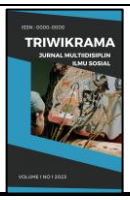
1. PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Tanpa ketersediaan air yang layak, kualitas hidup masyarakat akan menurun karena air bersih dibutuhkan untuk berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi. Robinson (2018) menegaskan bahwa kebutuhan air manusia tidak pernah habis, terutama untuk keperluan penting seperti minum, memasak, mandi, dan kebersihan. Oleh sebab itu, ketersediaan dan pengelolaan sumber daya air yang baik menjadi isu penting dalam pembangunan masyarakat, khususnya di wilayah yang rawan terhadap krisis air bersih.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 122 Tahun 2015, sumber air minum dapat diperoleh dari sungai, curah hujan, air permukaan, dan air tanah. Namun, ketersediaan air bersih semakin menurun akibat meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya kebutuhan terhadap air. Seiring pertumbuhan penduduk, kebutuhan air mengalami eskalasi,

*Corresponding author
E-mail addresses: skwnoff@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 6, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



sementara daya dukung lingkungan dan ketersediaan sumber air sering kali tidak mampu mengimbangi. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah, terutama di wilayah yang memiliki kondisi iklim dan geografis rentan, seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Messakh (2020) menjelaskan bahwa air bersih sangat penting bagi masyarakat karena digunakan untuk minum, memasak, mandi, mencuci, hingga keperluan pertanian sederhana. Namun, akses terhadap air bersih tidak merata dan sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, serta kebiasaan masyarakat. Keterbatasan penyediaan air bersih dapat memengaruhi produktivitas ekonomi, kesehatan masyarakat, bahkan kualitas kehidupan secara menyeluruh.

Provinsi NTT dikenal sebagai wilayah dengan karakter iklim semi-arid, yang ditandai dengan curah hujan rendah dibandingkan dengan tingkat evapotranspirasi (UNEMG, 2011). Berdasarkan kajian Food and Agriculture Organization (FAO, 1989), wilayah semi-arid adalah kawasan yang cenderung kering dengan keterbatasan kuantitas dan kontinuitas air. Kondisi ini menjadikan masyarakat di kawasan tersebut rentan terhadap krisis air bersih, terutama untuk kebutuhan dasar seperti air minum. Wilayah Kefamenanu sebagai bagian dari NTT juga menghadapi tantangan serupa, dengan meningkatnya kebutuhan air akibat pertumbuhan penduduk dan intensitas pembangunan yang tidak sebanding dengan kapasitas penyediaan air.

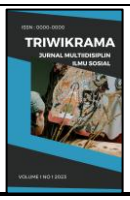
Kondisi krisis air bersih di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, menunjukkan adanya kerentanan sosial yang nyata. Kerentanan sosial dipahami sebagai kondisi rapuh yang dialami masyarakat akibat pengaruh krisis, ancaman, atau bencana yang dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, maupun kesehatan (Rahmaningtyas dan Setyono, 2015). Hizbaron (2010) menekankan bahwa kerentanan sosial dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, ekonomi, hingga latar belakang budaya. Sementara menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2012), kerentanan sosial berkaitan dengan kondisi kependudukan, tingkat kesehatan, dan pendidikan masyarakat yang dapat memperbesar dampak dari bahaya atau bencana.

Di Desa Fafinesu B, kualitas sumber air yang tersedia sebenarnya baik, namun masalah utama terletak pada pendistribusian air yang tidak memadai. Hanya terdapat satu mata air yang menjadi tumpuan seluruh desa. Minimnya sumber daya manusia yang memahami sistem pengelolaan air, seperti pemasangan dan pemeliharaan pipa, memperparah kondisi krisis. Faktor ekonomi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani juga membatasi kemampuan mereka dalam mengatasi masalah ini. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah terkait tata kelola sumber daya air membuat masyarakat semakin rentan terhadap dampak krisis air bersih.

Dalam konteks politik pembangunan daerah, pemerintah memiliki peran strategis dalam menanggulangi kerentanan air bersih. Kamsuari (2011) menyebutkan empat peran penting pemerintah daerah dalam pembangunan, yaitu: (1) entrepreneur, dengan tanggung jawab mengelola sumber daya secara langsung untuk kesejahteraan masyarakat; (2) koordinator, yang menetapkan kebijakan pembangunan dan merangkul berbagai pihak dalam pelaksanaannya; (3) fasilitator, yang mempercepat pembangunan melalui perubahan sikap, budaya, dan perilaku masyarakat; serta (4) stimulator, yang mendorong penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Keempat peran ini dapat diterapkan dalam penyelesaian krisis air bersih, dengan membangun infrastruktur, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan menciptakan kebijakan yang inklusif serta berkelanjutan.

Kerentanan sosial akibat krisis air bersih di Desa Fafinesu B menunjukkan adanya hubungan erat antara faktor lingkungan, sosial, dan kebijakan politik. Pemerintah desa memiliki peran krusial dalam menanggulangi masalah ini dengan membangun sistem distribusi air yang memadai, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal, serta mengembangkan program kolaboratif dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting, baik dalam bentuk gotong royong,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 6, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



pemeliharaan fasilitas, maupun peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya air.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis fenomena kerentanan sosial akibat krisis air bersih di Desa Fafinesu B, Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana krisis air bersih membentuk kondisi kerentanan sosial masyarakat, peran pemerintah desa dalam menanggulanginya, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam menghadapi masalah tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai keterkaitan antara kerentanan sosial dan tata kelola sumber daya air bersih di wilayah semi-arid, serta menawarkan rekomendasi bagi strategi pembangunan daerah yang lebih responsif dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerentanan Sosial

Kerentanan sosial merupakan suatu konsep yang menggambarkan tingkat kerapuhan masyarakat dalam menghadapi bencana atau tekanan eksternal yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup mereka (Aisha et al., 2019). Kerentanan sosial mencerminkan seberapa besar potensi kerugian yang dapat dialami oleh suatu kelompok masyarakat akibat paparan bahaya atau ancaman. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2016), kerentanan sosial diukur melalui berbagai parameter, seperti kepadatan penduduk dan kelompok rentan. Kelompok rentan ini mencakup rasio jenis kelamin, tingkat kemiskinan, proporsi penyandang disabilitas, dan rasio kelompok umur.

Kepadatan penduduk merupakan indikator penting karena dapat memengaruhi seberapa besar tekanan terhadap sumber daya yang tersedia. Semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu wilayah, semakin besar pula risiko terhadap bencana atau krisis, karena keterbatasan lahan, air, dan fasilitas umum (Menteri Dalam Negeri, 2010). Rasio jenis kelamin memberikan gambaran perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan per 100 penduduk perempuan di wilayah tertentu, yang dapat memengaruhi dinamika sosial dan kapasitas adaptasi masyarakat. Rasio kemiskinan menggambarkan persentase rumah tangga yang dikategorikan sebagai miskin, yaitu keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera tingkat 1 menurut BKKBN. Tingginya angka kemiskinan dapat memperbesar kerentanan karena keterbatasan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesehatan.

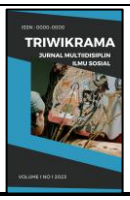
Selain itu, rasio penyandang disabilitas menjadi salah satu indikator karena kelompok ini memiliki keterbatasan mobilitas dan memerlukan perhatian khusus dalam penanggulangan bencana (Menteri Dalam Negeri, 2010). Rasio kelompok umur, yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif dan nonproduktif, juga menjadi faktor penting. Wilayah dengan proporsi anak-anak dan lansia yang tinggi cenderung lebih rentan karena kelompok ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap penduduk usia produktif.

Rachmawati dkk. (2018) menambahkan bahwa kerentanan sosial dapat dianalisis melalui kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk. Rohmat (2019) menegaskan pentingnya memperhatikan persentase penduduk balita dan lansia karena mereka merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap dampak bencana. Adiyoso (2018) melihat kerentanan sosial sebagai hasil dari interaksi kompleks antara struktur sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemahaman masyarakat tentang ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, kerentanan sosial merupakan fenomena multidimensi yang mencakup aspek demografi, ekonomi, dan sosial-budaya.

Kerentanan Air Bersih

*Corresponding author
E-mail addresses: skwnoff@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 6, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Kerentanan air bersih berkaitan dengan kemampuan suatu wilayah untuk mempertahankan ketersediaan dan kualitas sumber daya air di tengah tekanan lingkungan dan aktivitas manusia. Secara global, cadangan air tawar hanya mewakili 3% dari total volume air, dan sekitar 33% dari cadangan tersebut berbentuk air tanah (Marsily, 2009). Namun, air tanah semakin rentan akibat urbanisasi, eksploitasi berlebihan, dan pencemaran.

Vrba & Zaporozec (1994) mendefinisikan kerentanan sebagai sifat intrinsik sistem air tanah yang bergantung pada sensitivitasnya terhadap pengaruh manusia. Sekutu dkk. (2008) memperjelas bahwa kerentanan mencerminkan kegagalan alami lapisan tanah untuk melindungi air tanah dari polusi, yang sangat bergantung pada kondisi hidrogeologi. Schnebelen dkk. (2002) membedakan dua jenis kerentanan, yaitu kerentanan intrinsik dan kerentanan spesifik. Kerentanan intrinsik menggambarkan karakteristik alami lingkungan yang menentukan tingkat sensitivitas terhadap polusi, tanpa mempertimbangkan jenis polutan tertentu. Sementara itu, kerentanan spesifik mempertimbangkan sifat-sifat polutan tertentu, seperti kelarutan dan biodegradabilitas, serta kemampuannya berinteraksi dengan komponen tanah.

Pencemaran air tanah dapat bersumber dari berbagai aktivitas manusia, seperti penggunaan pupuk dan pestisida, kebocoran tangki bahan kimia, pembuangan limbah domestik, hingga kecelakaan industri (Margat & Monition, 1971; Behanzin dkk., 2021). Karakteristik polutan—misalnya pH, tingkat kelarutan, dan kandungan bahan organik tanah—akan memengaruhi mobilitas dan persistensinya di bawah tanah (Allier et al., 2008). Oleh karena itu, pemetaan kerentanan intrinsik sering digunakan untuk menilai risiko pencemaran air tanah dan merancang strategi pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif.

Penelitian Dibi dkk. (2013) serta Kouakou dkk. (2022) menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis GIS dan analisis multi-kriteria untuk menilai kerentanan spesifik, seperti pencemaran nitrat di air tanah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti dan pembuat kebijakan mengidentifikasi wilayah dengan risiko tinggi dan merumuskan intervensi yang lebih tepat sasaran.

Krisis Air Bersih

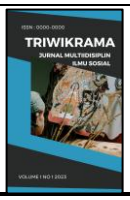
Krisis air bersih terjadi ketika ketersediaan air tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia. PP RI Nomor 122 Tahun 2015 menjelaskan bahwa sumber air minum berasal dari sungai, hujan, air permukaan, dan air tanah. Namun, pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan air semakin meningkat, sedangkan ketersediaannya semakin terbatas (Messakh, 2015). Padahal, hanya sekitar 0,003% dari total air di bumi yang dapat langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan inilah yang menimbulkan krisis air, terutama di daerah dengan curah hujan rendah dan topografi sulit.

Pemerintah Desa

Desa merupakan unit pemerintahan terendah yang memiliki hak otonomi dalam mengatur urusan masyarakat setempat. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa, yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya (Binamulia Hukum, 2018). Peran pemerintah desa sangat penting dalam mengelola sumber daya, termasuk air bersih, karena mereka lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan lokal.

Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, memiliki tantangan tersendiri dalam penyediaan air bersih karena kondisi geografisnya berbukit dengan elevasi 480–650 mdpl. Mata air berada di ketinggian 650 mdpl, sehingga distribusi air ke pemukiman yang berada di ketinggian lebih rendah menjadi sulit. Pada musim kemarau, masyarakat harus menempuh jarak hingga 3 km untuk mendapatkan air dengan debit yang terbatas. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah desa untuk menyediakan infrastruktur yang memadai seperti pipa distribusi, penampungan air, serta sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 6, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami fenomena kerentanan sosial akibat krisis air bersih di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Menurut Sugiyono (2021:10), penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), di mana peneliti menjadi instrumen kunci yang berperan aktif dalam mengumpulkan data melalui interaksi langsung dengan informan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran mendalam mengenai situasi sosial, makna yang dibangun oleh masyarakat, serta strategi yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat dalam menghadapi krisis air bersih. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Fafinesu B pada bulan Juni 2024 dengan fokus utama menganalisis upaya pengurangan kerentanan terhadap tekanan permasalahan air bersih. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2001), sehingga hanya individu yang dianggap mengetahui secara mendalam tentang permasalahan air bersih yang dijadikan narasumber, yaitu Kepala Desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat umum. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku masyarakat dan situasi nyata terkait distribusi air (Sugiyono, 2012:309), sedangkan wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi langsung dari informan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan dan solusi yang diterapkan (Sugiyono, 2012:317). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti visual atau catatan tertulis yang relevan dengan fenomena yang diteliti (Samsu, 2017:99). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh dan komprehensif mengenai kerentanan sosial akibat krisis air bersih serta peran pemerintah desa dalam mengatasinya. Analisis ini disajikan dalam bentuk deskripsi naratif yang menjelaskan hubungan antar-temuan di lapangan, sehingga dapat menggambarkan kondisi riil yang terjadi di masyarakat serta memberikan kontribusi bagi perumusan strategi penyelesaian masalah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

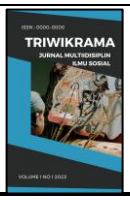
HASIL

Krisis Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Fafinesu B menghadapi krisis sosial yang berkepanjangan akibat kegagalan penyediaan air bersih. Proyek pembangunan sumur bor dengan nilai anggaran Rp 311.110.420 yang dimulai pada tahun 2020 hingga Januari 2025 tidak berfungsi sama sekali. Sumur tersebut tidak mengeluarkan air dan tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat. Kondisi ini membuat masyarakat tetap mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Air bersih merupakan kebutuhan vital yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, dan kualitas hidup masyarakat. Namun, ketiadaan akses air membuat warga kesulitan untuk memasak, mandi, mencuci, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Dalam wawancara dengan AN (Kepala Desa, 29 Juli 2024), terungkap bahwa salah satu kendala utama dalam penyelesaian masalah ini adalah kurangnya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa. Hal ini

*Corresponding author
E-mail addresses: skwnoff@gmail.com



menunjukkan bahwa krisis sosial tidak hanya dipicu oleh faktor teknis, tetapi juga oleh lemahnya komunikasi dan koordinasi di tingkat lokal.

Selain itu, wawancara dengan TT (Tokoh Adat, 29 Juli 2024) menunjukkan bahwa krisis air juga memengaruhi sektor pertanian, yang merupakan mata pencaharian utama warga. Kekurangan air membuat lahan pertanian sulit diolah secara maksimal, sehingga produktivitas pertanian menurun. Dalam konteks sosial, hal ini memperdalam kerentanan ekonomi warga yang menggantungkan hidup dari hasil tani.

Sementara itu, wawancara dengan EH (Masyarakat, 30 Juli 2024) menegaskan bahwa sebenarnya terdapat beberapa mata air alami di wilayah pegunungan sekitar desa. Namun, hanya tiga mata air yang dimanfaatkan, sedangkan sisanya tidak dapat digunakan karena kurangnya pemeliharaan dan kerja sama masyarakat untuk membersihkannya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa krisis sosial bukan hanya akibat ketiadaan sumber daya, tetapi juga karena kurang optimalnya pengelolaan sumber daya yang ada.

Secara keseluruhan, krisis sosial di Desa Fafinesu B menggambarkan kegagalan kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola kebutuhan dasar. Kegagalan ini berimplikasi pada melemahnya solidaritas sosial, berkurangnya kualitas hidup, dan meningkatnya rasa ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintah.

Krisis Ekonomi

Krisis air bersih berimplikasi langsung pada kondisi ekonomi masyarakat. Desa Fafinesu B merupakan desa yang sebagian besar warganya menggantungkan hidup pada pertanian subsisten. Dengan terbatasnya ketersediaan air, hasil pertanian menjadi tidak optimal, sehingga masyarakat hanya mampu mencukupi kebutuhan hidup secara seadanya.

Wawancara dengan MS (Masyarakat, 30 Juli 2024) menunjukkan bahwa salah satu penyebab menurunnya kondisi ekonomi adalah tidak terealisasinya janji politik dari calon kepala desa. Janji untuk memperbaiki akses air bersih selalu menjadi bahan kampanye, tetapi tidak ada yang benar-benar terwujud. Kondisi ini membuat masyarakat semakin pesimis terhadap keberhasilan pembangunan desa.

Dari wawancara dengan YS (Masyarakat, 30 Juli 2024) diketahui bahwa krisis air juga memperparah beban ekonomi keluarga. Minimnya infrastruktur air bersih, lemahnya pengawasan kualitas air, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air membuat banyak keluarga harus membeli air dengan harga yang cukup mahal. Hal ini semakin menekan kondisi ekonomi keluarga miskin.

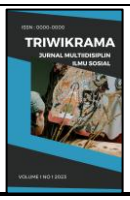
Wawancara dengan FP (Aparat Desa, 31 Juli 2024) menambahkan perspektif lain, yaitu bahwa krisis air bukan semata-mata disebabkan oleh kegagalan proyek, melainkan juga dipicu oleh faktor alam seperti musim kemarau panjang akibat perubahan iklim, pertambahan jumlah penduduk, dan pengelolaan air yang tidak teratur. Faktor-faktor ini memperburuk kondisi sumber air yang ada, sehingga semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara ekonomi, kondisi ini menciptakan lingkaran masalah: kekurangan air menurunkan produktivitas pertanian, berkurangnya hasil tani memperburuk ekonomi keluarga, sementara meningkatnya pengeluaran untuk membeli air semakin memperberat beban finansial. Krisis ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dapat memicu kerentanan ekonomi yang berkelanjutan.

Krisis Politik

Krisis politik di Desa Fafinesu B tidak dapat dipisahkan dari krisis air dan ekonomi yang terjadi. Permasalahan penyediaan air bersih seringkali menjadi isu utama dalam kontestasi politik, khususnya dalam pemilihan kepala desa. Namun, janji-janji politik yang tidak terpenuhi telah menimbulkan kekecewaan masyarakat dan melemahkan legitimasi pemerintah desa.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 6, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Proses politik di desa sering diwarnai praktik yang tidak sehat seperti politik uang, kampanye hitam, serta nepotisme. Kandidat yang memiliki modal finansial lebih besar seringkali memiliki peluang lebih tinggi untuk menang, meskipun tidak selalu mampu membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat. Akibatnya, politik desa lebih banyak berfungsi sebagai ajang perebutan kekuasaan dibandingkan sebagai sarana untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Wawancara dengan PN (Masyarakat, 31 Juli 2024) mengungkapkan bahwa keterbatasan air membuat masyarakat terbiasa mengantri di bak penampungan, terutama pada musim kemarau. Bahkan, banyak keluarga harus membeli air dengan biaya tinggi. Meskipun kondisi ini sudah berlangsung lama, masyarakat jarang melakukan aksi protes terbuka, melainkan memilih bertahan dengan segala keterbatasan. Sikap ini menunjukkan kedewasaan sosial, tetapi sekaligus mencerminkan lemahnya daya tawar politik masyarakat terhadap pemerintah.

Sementara itu, wawancara dengan PT (Masyarakat, 31 Juli 2024) memperlihatkan bahwa dampak krisis air sangat besar terhadap keluarga miskin. Mereka harus mengorbankan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan air dan mengeluarkan biaya tambahan untuk membelinya. Kondisi ini tidak hanya menekan ekonomi, tetapi juga menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Dengan demikian, krisis politik di Desa Fafinesu B semakin memperkuat lingkaran krisis sosial dan ekonomi. Ketidakmampuan pemerintah desa dalam memberikan solusi konkret memperburuk kepercayaan masyarakat, sehingga memperlambat jalannya pembangunan dan meningkatkan ketimpangan antarwarga.

PEMBAHASAN

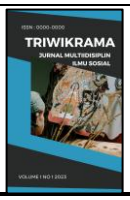
Krisis yang dialami Desa Fafinesu B dapat dipahami sebagai fenomena multidimensi yang saling berkelindan antara aspek sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketiadaan akses air bersih, yang telah berlangsung sejak gagalnya proyek pembangunan sumur bor pada tahun 2020. Proyek senilai Rp 311.110.420 tersebut hingga awal tahun 2025 belum menghasilkan keluaran yang diharapkan, yakni penyediaan air bersih yang berfungsi untuk seluruh warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah air bukan sekadar persoalan teknis, tetapi merupakan cerminan lemahnya tata kelola pembangunan desa.

Krisis sosial yang muncul akibat ketiadaan air bersih berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Kebutuhan dasar seperti memasak, mandi, mencuci, dan pemeliharaan sanitasi tidak dapat terpenuhi secara layak. Hal ini memicu kerentanan kesehatan, termasuk risiko meningkatnya penyakit berbasis air, serta menimbulkan tekanan psikologis pada warga yang setiap hari harus mencari cara untuk memperoleh air. Dalam wawancara dengan Kepala Desa (AN, 29 Juli 2024) dan salah satu tokoh adat (TT, 29 Juli 2024), tergambar bahwa selain kegagalan proyek, masalah juga diperparah oleh kurangnya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya air yang ada. Meskipun terdapat mata air alami di beberapa titik sekitar desa, hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan karena minimnya koordinasi dan kerja bakti warga untuk membersihkan dan menjaga sumber air tersebut. Fenomena ini mencerminkan bahwa krisis sosial di desa tersebut bersifat struktural: bukan hanya kekurangan sumber daya, tetapi juga lemahnya partisipasi kolektif dan koordinasi sosial.

Ketiadaan air bersih juga memengaruhi dinamika ekonomi lokal. Masyarakat Fafinesu B sebagian besar bergantung pada sektor pertanian subsisten yang sangat membutuhkan pasokan air yang memadai. Kekurangan air menyebabkan lahan pertanian sulit diolah, hasil panen menurun, dan produktivitas pertanian merosot. Hal ini secara langsung mengurangi pendapatan rumah tangga dan memperburuk ketahanan pangan. Dalam wawancara dengan masyarakat (YS,

*Corresponding author
E-mail addresses: skwnoff@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 6, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



30 Juli 2024) dan aparat desa (FP, 31 Juli 2024), terungkap pula bahwa kondisi ini diperparah oleh musim kemarau yang semakin panjang akibat perubahan iklim serta bertambahnya jumlah penduduk yang meningkatkan permintaan air. Akibatnya, warga harus mengantri di bak penampungan untuk mendapatkan air, bahkan sebagian harus membeli air dengan harga yang relatif mahal. Situasi ini menggerus daya beli keluarga miskin dan menyita waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk bekerja atau mengelola lahan. Dengan demikian, krisis air menciptakan lingkaran persoalan ekonomi: pengeluaran rumah tangga meningkat, produktivitas menurun, dan kemiskinan semakin sulit diatasi.

Dimensi politik juga memperumit persoalan yang ada. Persoalan air bersih menjadi tema utama dalam setiap kontestasi politik, khususnya pemilihan kepala desa, namun janji-janji politik yang diutarakan calon pemimpin jarang terealisasi setelah mereka menjabat. Warga, seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan MS (30 Juli 2024), merasa kecewa karena janji penyediaan air bersih tidak pernah dituntaskan. Keadaan ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memperlemah partisipasi politik warga. Meskipun demikian, masyarakat Fafinesu B cenderung tidak melakukan protes atau demonstrasi, melainkan menerima keadaan dengan cara bertahan dan menyesuaikan diri. Wawancara dengan PN (31 Juli 2024) dan PT (31 Juli 2024) menunjukkan bahwa meskipun warga harus mengantre dan membeli air dengan biaya tinggi, mereka tetap menghindari konfrontasi terbuka dengan pemerintah. Sikap ini dapat dipandang sebagai bentuk kedewasaan sosial, namun sekaligus memperlihatkan lemahnya daya tawar politik yang dimiliki masyarakat terhadap pengambil keputusan di tingkat desa.

Jika dilihat secara keseluruhan, ketiga krisis tersebut saling terkait dalam suatu pola sebab-akibat yang membentuk lingkaran masalah. Krisis sosial berupa ketiadaan air bersih memicu krisis ekonomi melalui penurunan produktivitas pertanian, peningkatan pengeluaran rumah tangga, dan memburuknya kesejahteraan masyarakat. Krisis ekonomi yang berkepanjangan memperdalam krisis sosial, karena menimbulkan kesenjangan dan memperburuk kualitas hidup. Kedua krisis tersebut memperlemah legitimasi pemerintah desa, menciptakan krisis politik berupa menurunnya kepercayaan masyarakat dan melemahnya partisipasi pembangunan. Sebaliknya, lemahnya tata kelola politik memperlambat penyelesaian masalah sosial dan ekonomi, sehingga lingkaran krisis terus berulang tanpa penyelesaian yang memadai.

Analisis ini menegaskan pentingnya pendekatan terpadu untuk memutus siklus krisis yang terjadi di Desa Fafinesu B. Penyelesaian masalah air bersih perlu dijadikan prioritas utama karena merupakan titik awal yang dapat memulihkan aspek sosial dan ekonomi. Namun, perbaikan teknis saja tidak cukup. Diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan desa agar proses pembangunan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat harus didorong melalui forum musyawarah desa yang inklusif, kerja bakti bersama, dan pelatihan manajemen sumber daya air agar keberlanjutan pengelolaan dapat terjaga.

Dengan demikian, krisis di Desa Fafinesu B adalah cerminan tantangan pembangunan pedesaan yang kompleks, di mana masalah teknis, sosial, ekonomi, dan politik saling berkaitan. Pendekatan yang parsial hanya akan memperpanjang permasalahan. Hanya dengan intervensi yang bersifat holistik—melibatkan perbaikan infrastruktur, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat—krisis multidimensi ini dapat diatasi dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

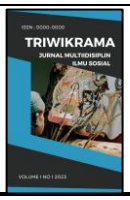
.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis air bersih di Desa Fafinesu B merupakan sumber utama yang memicu krisis sosial, ekonomi, dan politik. Secara sosial, ketiadaan air bersih

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 6, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan menurunkan kualitas hidup. Secara ekonomi, kekurangan air menyebabkan penurunan hasil pertanian, memaksa masyarakat membeli air dengan biaya tinggi, dan memperburuk kemiskinan. Secara politik, kegagalan pemerintah desa dalam menangani krisis air menimbulkan kekecewaan masyarakat, menurunkan legitimasi kepemimpinan, dan memperlemah partisipasi politik.

Krisis ini membentuk lingkaran masalah yang saling memperkuat: krisis sosial memperburuk krisis ekonomi, krisis ekonomi memperdalam krisis sosial, dan keduanya memperlemah tata kelola politik yang akhirnya memperlambat penyelesaian masalah. Dengan demikian, krisis di Desa Fafinesu B harus dipandang sebagai krisis multidimensi yang memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif.

Saran

1. Penyediaan Infrastruktur Air Bersih
   Pemerintah desa bersama pemerintah daerah perlu memperbaiki dan mengoptimalkan sistem penyediaan air bersih, termasuk pemanfaatan mata air yang ada, pembangunan jaringan pipa, dan penampungan air yang memadai.
2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa
   Diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agar program penyediaan air bersih dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
3. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat
   Masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sarana air bersih. Gotong royong dan kerja bakti membersihkan mata air dapat menjadi langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pada proyek pemerintah semata.
4. Pendidikan dan Sosialisasi
   Pemerintah desa dapat menyelenggarakan penyuluhan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, termasuk pemanfaatan teknologi sederhana untuk konservasi air.
5. Pendekatan Holistik
   Penanganan krisis harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, LSM, sektor swasta, dan perguruan tinggi, untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Adiyoso, W. (2018). Manajemen bencana: Pengantar dan isu-isu strategis. Jakarta: Bumi Aksara.

As'ari, R., Mulyanie, E., & Rohmat, D. (2019). Zonasi pemanfaatan lahan pasca penambangan pasir di pesisir Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Jurnal Geografi, 11(2), 171–181.

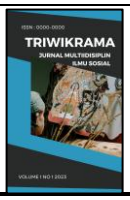
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2013). Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diakses 20 April 2017.

Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia.

Edwar III, G. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bukit Cemara Tidar.

Evi, S. T., Kasman, K., & Irwan, M. (2021). Kerentanan dan ketahanan ekonomi masyarakat terhadap kerusakan lingkungan. Jurnal Kejahatan Transnasional.

*Corresponding author
E-mail addresses: skwnoff@gmail.com



Hizbaron, D. R., Hadmoko, D. S., Samodra, G., Dalimunthe, S. A., & Sartohadi, J. (2010). Tinjauan kerentanan, risiko dan zonasi rawan bahaya rockfall di Kulonprogo. SSSY Yogyakarta.

Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia: Sebuah Kompilasi Laporan Perjalanan Riset di Tiga Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia (2018–2020).

Mauleny, A. T. (2016). Aglomerasi, perubahan sosial ekonomi, dan kebijakan pembangunan Jakarta. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 6(2), 147–162.

Messakh, J. J. (2015). Kajian pemenuhan kebutuhan air minum untuk masyarakat di kawasan semi-arid Indonesia.

Messakh, J. J., Arwin, S., Hadihardaja, I. K., & Dupe, Z. (2015). Management strategy of water resources based on rainfall characteristics in the semi-arid region in Indonesia. International Journal of Scientific and Engineering Research (IJSER), 8(6), 331–338.

Naryanto, H. S. (2020). Analisis risiko bencana gempa di Kabupaten Serang. Jurnal ALAMI: Jurnal Teknologi Reduksi Risiko Bencana, 4(2), 113–122.

Nasarullah, A. S. (2022). Implementasi kebijakan program keluarga harapan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Disertasi Doktor, Universitas Negeri Makassar).

Nuri, R. C., Gravitiani, E., Suryanto, & Perwithosuci, W. (2020). Strategi ketahanan sosial ekonomi masyarakat dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Puspitotanti, E., & Karmilah, M. (2022). Kajian kerentanan sosial terhadap bencana banjir. Jurnal Kajian Ruang, 1(2), 177–197.

Rachmawati, T. A., Rahmawati, D., & Susilo, A. (2018). Pengurangan risiko bencana berbasis tata ruang. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press.

Rahmaningtyas, N., & Setyono, J. S. (2015). Tingkat kerentanan sosial wilayah Kabupaten Wonogiri. Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota), 4(4), 653–665.

Ramadhani, N. I. (2017). Pemetaan risiko bencana longsor di kawasan lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Rakhim, A., Nurnawaty, N., Sophian, R., & Rahman, H. F. (2020). Analisis distribusi air bersih pada sistem perpipaan Gedung Menara Iqra Kampus Unismuh Makassar. Teknik Hidro, 13(2), 47–56.

Singarimbun, A. (2008). Pengaruh perbandingan tepung terigu dengan tepung jagung dan konsentrasi kalium sorbat terhadap mutu mie basah (boiled noodle).

Thoha, M. (2012). Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Bina Mulia Hukum, 3(1), 85–102.

Widodo, B. (2018). Membangun kedewasaan berpolitik warga masyarakat akademis melalui pendidikan kewarganegaraan. JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan), 3(1), 70–78.